

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SMK MINI DI JAWA TIMUR

Oleh : Hudiyono
Diknas Prov. Jatim

Abstract

Vocational High School Mini is SMK formal at boarding school who get the program centers preparing a skilled workforce and develop the function of vocational boarding school as a center for vocational training integrated in an effort to push the unemployment rate is high, improving the quality of the educational process is minimal skills, and increase the entrepreneurial spirit in self-learners. Based on this, the main problem of this study are: (a) How is the implementation of policy administration SMK Mini? and (b) How does the organization of vocational Mini models in East Java?. This study used a qualitative approach and case study design. Collecting data using the technique of participant observation, interview and documentation. The data were analyzed using qualitative descriptive technique, using an interactive model of Miles and Huberman includes: data collection, data reduction, data presentation and verification. This study found: (1) the implementation of policy administration in East Java SMK Mini applied properly in accordance with the proportions. The process of policy implementation refers to the implementation model Edwards III. While the level of effectiveness of policy implementation organization of vocational Mini in East Java in general demonstrate effective, in terms of appropriate targeting and program objectives. (2) the implementation of vocational Model Mini in East Java is more taken to function as BLK (Training Center) in entrepreneurial-based boarding school; in function SMK Mini as BLK fostering entrepreneurship skills and training of skilled labor. Entrepreneurship skills developed in the organization of vocational Mini comprises: (a) skills of design effort in the field of services and production; (b) the skills to find a market; (c) skills to manage business finances; and (d) public relations skills. While the training of skilled labor carried out in several stages of a cycle of: (a) planning of the training program by identifying training needs and training materials emphasize entrepreneurial skills according to market needs and based on the needs of the industrial world; (b) development of training programs through cooperation and training of manpower training in vocational Mini implemented within six months.

Keywords: Policy Implementation, Vocational High School Mini

Latar Belakang

Gubernur Jawa Timur, mengeluarkan kebijakan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini melalui bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) dan Perguruan Tinggi (Perti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa dengan didirikan SMK Mini, mampu menciptakan tenaga kerja yang siap untuk bertarung dalam AEC (Asean Economic Community) 2015 mendatang. Kendati berlabel SMK, sekolah ini memberi program pelatihan singkat (6 bulan) bagi peserta didiknya. Kebijakan itu dimaksudkan meyakini implementasi Kebijakan PMU dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkauanya layanan pendidikan menengah

kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”.

Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang atau jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Gubernur Jawa Timur sangat antusias terhadap tawaran kerjasama pemerintah Jerman tentang kebutuhan tenaga kerja untuk anak-anak lulusan SMK di Jawa Timur. Tawaran kerjasama itu, disampaikan oleh Lembaga Pendidikan Kejuruan Andreas Gosche dan dipertegas oleh Atase Pendidikan dan kebudayaan Jerman Prof. Dr. Rernat Agus Rubiyanto. Tawaran dari Jerman tersebut sangat menantang untuk Jawa Timur, sebab sebanyak enam juta lowongan kerja yang ditawarkan bagi anak lulusan SMK itu belum ada standar yang diberlakukan. Untuk itu, agar tenaga-tenaga terampil lulusan SMK Jawa Timur bisa dan dapat mengisi lowongan yang ada sesuai ketrampilan yang mereka miliki sekaligus yang dibutuhkan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera memperbaiki sistem pendidikan belajar mengajar di SMK-SMK, yakni yang tadinya 40-60 menjadi 70 praktek dan 30 persen teori. Kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dispendik) dengan Jerman mulai dilakukan sekarang tetapi pelaksanaannya baru dilakukan tahun 2015. Tawaran kerjasama lowongan kerja itu bukan lulusan apa yang dipertanyakan tapi kerja apa mereka nanti di sana.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menginginkan untuk menyatukan visi dan misi dalam satu arah kebijakan, menyiapkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil serta memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, berakhlak mulia. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga mengharapkan agar para dunia usaha atau dunia kerja ikut berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan pendidikan mulai dari kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pendidikan. Sehingga nantinya akan terjalin sinergi antara penyedia tenaga kerja, pencari kerja dan pengguna tenaga kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan tantangan jaman. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga berharap tersusunnya dokumen konsep implementasi kebijakan sistem sinergitas anatara pendidikan vokasional dengan kadin, dunia usaha/industri, pusat pelatihan pendidikan dan lembaga sertifikasi dan standarisasi.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berupaya melakukan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan keterampilan masyarakat daerah. Salah satunya adalah pendirian SMK Mini dan SMK Potensial di daerah-daerah terpencil. Program baru yang digagas itu terkait dengan pendidikan vokasional (keterampilan), pendirian SMK itu disebut SMK Mini dalam lingkungan Pondok Pesantren.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mini sebagai salah satu upaya menyiapkan tenaga terampil guna menghadapi persaingan *Asean Economic Community* (AEC) 2015. Dengan mendirikan SMK mini, akan diciptakan tenaga kerja yang siap untuk bertarung dalam AEC 2015 mendatang. "Pemprov Jatim berencana membangun 70 SMK mini pada tahun 2014, dan angka tersebut akan bertambah pada tahun depan," Sebagai rintisan, telah berdiri 40 SMK Mini di Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bangkalan, Jombang, Banyuwangi, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Blitar, dan Kota-Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan dana pendamping 250 juta rupiah sebagai dana hibah untuk satu SMK Mini di mana dana tersebut merupakan dana APBD

dan satu SMK Mini melatih 200 peserta didik. SMK Mini bertujuan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia peserta didik yang ada di dalam pondok pesantren. Total anggaran sekitar 17,5 milyar rupiah yang disiapkan pemerintah provinsi Jawa Timur ditujukan: 1. Sebesar 70% untuk pelatihan, produk, pembelian alat penunjang, 2. Sebesar 15% untuk pengembangan 3-10% untuk manajemen.

Kebijakan penyelenggaraan SMK Mini di Jawa Timur didirikan dengan tujuan mampu menciptakan kewirausahaan di pondok pesantren. Tiap SMK Mini, dapat menampung minimal 200 siswa yang diprioritaskan untuk santri, dan warga di sekitar ponpes ini juga bisa mengikuti pelatihan SMK Mini ini.

Bertolak dari latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengkaji tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini dengan fokus pada studi proses implementasi kebijakan dan model penyelenggaraan SMK Mini di Jawa Timur. Peneliti mengajukan asumsi bahwa jika implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini dilakukan melalui prosedur yang jelas dan berdasarkan data empirik serta mengacu pada teori dan konsep yang kuat, maka dengan sendirinya diyakini memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, bahkan dapat bersaing di tengah-tengah persaingan global yang sedang berlangsung dengan ketat dan cepat dewasa ini.

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat kajian secara mendalam yang dielaborasi ke dalam rumusan masalah penelitian, sebagai berikut: a. Bagaimanakah implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini di Jawa Timur? dan b. Bagaimanakah model penyelenggaraan SMK Mini di Jawa Timur?

Landasan Teoretik

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/*public policy* sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*)”. Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”.

Kebijakan publik menurut Dye (1998:1) adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan.

Laswell dan Kaplan, David Easton dalam Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat”, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik juga menyentuh nilai-nilai yang ada dalam

masyarakat. Suwitri (2008: 13) mencontohkan bahwa pergeseran nilai-nilai masyarakat dapat mengakibatkan pergeseran kebijakan publik seperti dicontohkan tatanan masyarakat yang sangat terbuka akan nilai-nilai baru membuat beberapa negara melegalkan perkawinan sesama jenis.

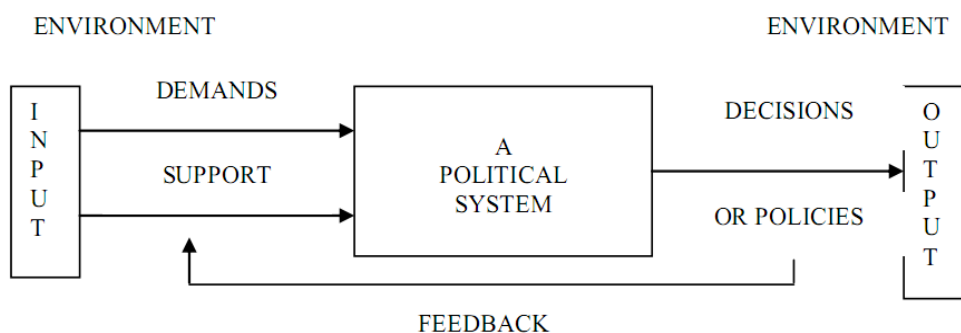
Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik atau pelaksanaannya.
- b. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
- c. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dari poin-poin di atas maka kita bisa menarik benang merah dari definisi kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan *stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*.

Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri dari *input*, *throughput*, dan *output*, seperti digambarkan sebagai berikut:

Gambar : Proses Kebijakan Publik Menurut Easton



Sumber: David Easton dalam Nugroho (2008: 383)

Model proses kebijakan publik dari Easton mengasumsikan proses kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Model Easton ini tergolong dalam model yang sederhana, sehingga model Easton ini dikembangkan oleh para akademisi lain seperti Anderson, Dye, Dunn, serta Patton dan Savicky.

Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini, peneliti akan berusaha meninjau implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini yang tercantum dalam Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 9 tahun 2014 Bagian Keempat tentang Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren pada pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Pemerintah Provinsi mendukung dan memfasilitasi pengembangan Balai Latihan Kerja atau Sekolah Menengah Kejuruan Mini di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.

Seperti yang disimpulkan dari teori-teori proses kebijakan bahwa setelah formulasi kebijakan, maka proses yang harus dilakukan adalah proses implementasi yang menuju pada kinerja kebijakan, maka kebijakan penyelenggaraan SMK Mini yang telah menjadi suatu kebijakan publik juga harus melalui tahap implementasi. Dikarenakan yang diteliti dalam disertasi ini adalah implementasi kebijakan, maka teori-teori kebijakan yang digunakan selanjutnya adalah teori-teori implementasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan (Dunn, 2000:80). Selain itu implementasi kebijakan dapat dikatakan menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu swasta (atau kelompok-kelompok) yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, sehingga implementasi kebijakan mencakup usaha-usaha pada suatu waktu untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi operasional, maupun melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Winarno, 1989:65).

Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut:

“Policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects” (Edward III, 1980:1).

Definisi yang diberikan oleh Paul A. Sabatier dan DA. Mazmanian – yang memandangnya sebagai bagian dari proses kebijakan - berikut ini mungkin dapat memperjelasnya:

“Implementation is the carrying out a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive or court decisions. Ideally that the decision identifies the problems (s) to be addressed, stipulates the objective (s) to be pursued and in a variety of ways, structures the implementation process (Sabatier dan Mazmanian, 1983 : 20).

Sabatier & Mazmanian menegaskan bahwa implementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum - bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dan lain-lain dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Program-program inilah yang kemudian disusun struktur pengimplementasiannya agar selanjutnya menghasilkan perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan yang dimaksud.

Karena implementasi merupakan perwujudan nyata dari (isi/tujuan) kebijakan publik, maka aktifitas-aktifitas implementasi haruslah dilakukan secara cermat. Bahwa memang ada kebijakan yang bersifat *self executed*, yakni yang dapat langsung dilaksanakan, tidaklah mengurangi makna penting dari kecermatan dalam menyusun proses implementasi, sebab dari hasil implementasi tersebut kinerja pemerintah dapat dinilai. Selain itu sebagai bagian dari proses kebijakan, maka dari hasil implementasilah kebijakan memperoleh umpan balik, apakah perlu kebijakan direvisi atau tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Sabatier dan Mazmanian:

“The process normally runs through a number of stages beginning with passage the basic statute, followed by policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those outputs, the perceived impacts of agency decisions, an finally important revisions (or attempted revisions) in the basic statute” (Sabatier dan Mazmanian 1983 : 20).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka implementasi kebijakan publik baru dapat dilaksanakan apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat dan dana untuk menunjang kegiatan tersebut telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan kegiatan sebelum implementasi kebijakan dilaksanakan disebut perencanaan kebijakan yang merupakan formulasi kebijakan atau tahapan dalam pembuatan kebijakan.

Penelitian mengadopsi pendapat dari Edward (1980) tentang beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan yang antara lain faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sehingga berdasarkan pendapat Edward ini, peneliti menjadikan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut sebagai variabel operasional dalam penelitian ini, karena menurut peneliti teori yang dikemukakan Edward ini lebih mudah dipahami dan dioperasionalkan dalam membahas permasalahan yang diteliti. Dengan berpijak dari pendapat tersebut sebagai pendekatan yang dipakai dalam pembahasan masalah yang diangkat, maka diharapkan adanya kerangka pikir yang jelas dengan alur dan urutan yang sistematis dalam pembahasan dan pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Pembahasan awal menyoroti apa sebenarnya efektivitas proses implementasi kebijakan itu. Dalam literatur administrasi ataupun manajemen, kata efektivitas diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki (Gie, 2002:16). James I. Gibson (1999:30) mengatakan efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input-proses-output*. Menurut Putra (1998:29), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa baik atau seberapa jauh sasaran (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai.

Selanjutnya Osborne dan Gaebler (1995:389), mengemukakan pengertian efektivitas adalah ukuran kualitas *output*, yaitu bagaimana mencapai *outcome* yang diharapkan. Ketika mengukur efektivitas, kita tahu apakah investasi kita berguna. Menurut Steers (1985:9), seringkali dikemukakan bahwa batu uji yang sebenarnya untuk manajemen yang baik sebagai yaitu: kemampuan mengorganisasikan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam tugas mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif. Kata kunci pengertian ini ialah: kata efektif, karena pada akhirnya keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas itu.

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.11 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini.

Gambar : Hubungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Sumber: Mahmudi, 2005:92.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas,

kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Efektivitas implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara *output* dengan Pedoman Teknis Bantuan SMK Mini Dalam Pengembangan SMK di Pondok Pesantren Tahun 2014 oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan dimensi efektivitas implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini mengikuti sistematika Budiani di atas, yaitu:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Penyelenggara SMK Mini memahami pedoman teknis bantuan hibah program SMK Mini.
 - b) Peserta didik berasal dari para santri di Pondok Pesantren dengan usia 18-35 tahun.
 - c) Peserta didik berasal dari para santri di Pondok Pesantren dengan selain usia 18-35 tahun.
 - d) Pelatihan dilaksanakan oleh SMK Mini dengan institusi pasangannya.
 - e) Peserta didik mendapatkan pembinaan skill *entrepreneurship*.
 - f) Kesesuaian kurikulum SMK Mini dengan penerapan dalam pekerjaan.
 - g) Jenis ketrampilan yang diikuti di SMK Mini dalam bentuk usaha mandiri.
 - h) Jenis ketrampilan yang diikuti di SMK Mini dalam bentuk magang pada DUDI.
 - i) Jenis ketrampilan yang diikuti di SMK Mini dalam bentuk teori atau tidak bekerja.
 - j) Kesesuaian pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan ketrampilan di SMK Mini.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan implementor kebijakan penyelenggaraan SMK Mini dalam melakukan sosialisasi program, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Indikator sosialisasi program yang diukur dalam penelitian ini adalah:
 - a) Efektivitas sosialisasi informasi program SMK Mini langsung ke instansi SMK yang terkait.

- b) Efektivitas sosialisasi informasi program SMK Mini melalui media elektronik (TV).
 - c) Efektivitas sosialisasi informasi program SMK Mini melalui media cetak (Koran Jawa Pos, Birawa, Duta dan Kompas).
 - d) Efektivitas sosialisasi informasi program SMK Mini workshop SMK Mini.
 - e) Efektivitas sosialisasi informasi program SMK Mini melalui pemagangan SDM (guru) SMK Mini di DUDI.
 - f) Efektivitas sosialisasi informasi program SMK Mini melalui seminar
 - g) Efektivitas sosialisasi informasi program SMK Mini melalui pameran produk SMK dan Perguruan Tinggi se Jawa Timur
 - h) Efektivitas sosialisasi informasi program SMK Mini rakor Kepala sekolah se Jawa Timur
 - i) Efektivitas sosialisasi informasi program SMK Mini rakor penyusunan proposal dan pelaporan SMK Mini
 - j) Efektivitas sosialisasi informasi program SMK Mini workshop evaluasi pelaksanaan SMK Mini.
3. Tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini dengan tujuan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Indikator sosialisasi program yang diukur dalam penelitian ini adalah:
- a) Menciptakan tenaga kerja terampil
 - b) Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan kesempatan belajar SMK di Pondok Pesantren
 - c) Menurunkan angka pengangguran
 - d) Meningkatkan perekonomian di lingkungan pondok pesantren.
 - e) Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran SMK di Pondok Pesantren.
 - f) Meningkatkan skill para santri sehingga mampu membuka lapangan kerja di lingkungan pondok pesantren sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal
 - g) Mewujudkan SMK Mini di Pondok Pesantren yang berbasis kewirausahaan;
 - h) Mewujudkan produk unggulan SMK Mini;
 - i) Menciptakan sentra usaha berbasis pesantren (*Pesantren Preneurship*);
 - j) Meningkatkan kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren;
 - k) Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, baik pada kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi;
 - l) Meningkatkan perekonomian di lingkungan pondok pesantren;
 - m) Mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Indikator sosialisasi program yang diukur dalam penelitian ini adalah:
- a) Efektivitas pemantauan dari Perguruan Tinggi terhadap penyusunan program pembelajaran SMK Mini.
 - b) Efektivitas pemantauan dari Perguruan Tinggi terhadap instruktur dan silabus materi pembelajaran SMK Mini.
 - c) Efektivitas pemantauan dari Perguruan Tinggi terhadap pembuatan laporan pelaksanaan program SMK Mini.

- d) Efektivitas pemantauan dari Perguruan Tinggi terhadap hasil program SMK Mini.
- e) Efektivitas pemantauan dari Perguruan Tinggi terhadap tahapan upaya SMK Mini dalam melakukan percepatan penyiapan tenaga kerja terampil.
- f) Efektivitas pemantauan dari Departemen Agama terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SMK Mini.
- g) Efektivitas pemantauan dari Departemen Agama terhadap tahapan upaya SMK Mini dalam melakukan percepatan penyiapan tenaga kerja terampil.
- h) Efektivitas pemantauan dari Disnaker terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SMK Mini.
- i) Efektivitas pemantauan dari Departemen Agama terhadap tahapan upaya SMK Mini dalam melakukan percepatan penyiapan tenaga kerja terampil.
- j) Efektivitas pemantauan dari DUDI terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SMK Mini.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara manusia dalam usaha mengerti sebuah fenomena sosial. Pendekatan penelitian memberikan asumsi mengenai dunia sosial, bagaimana ilmu pengetahuan dikelola, dan apa yang sesungguhnya merupakan masalah, solusi, dan kriteria pembuktian (Craswell, 1994:1). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Craswell (1994) *“qualitative research focuses on the process that is occurring as well as the product or outcome. Researchers are particularly interested in understanding how things occurs”* Pendekatan kualitatif dipilih mengingat penelitian ini berkenaan dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini dengan fokus penelitian tentang proses implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini, efektivitas implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini, ketrampilan kewirausahaan berbasis kompetensi dan model pelatihan tenaga kerja di SMK Mini.

Dengan demikian, data yang diungkap berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, dan dokumen-dokumen. Obyek penelitian tidak diberi perlakuan khusus atau dimanipulasi oleh peneliti sehingga data yang diperoleh tetap berada pada kondisi alami sebagai salah satu kriteria penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif. Berdasarkan teknik tersebut, penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati (Bogdan & Biklen, 1998).

Hasil eksplorasi dari penelitian ini diharapkan akan dapat membangun suatu teori yang bersifat induktif dari sejumlah abstraksi data yang telah dikumpulkan berkenaan data tentang proses implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini, efektivitas implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini, ketrampilan kewirausahaan berbasis kompetensi dan model pelatihan tenaga kerja di SMK Mini.

Sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini dengan fokus penelitian tentang studi proses implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini, efektivitas implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini, ketrampilan kewirausahaan berbasis kompetensi dan model pelatihan tenaga kerja di SMK Mini.

Berdasar tujuan penelitian tersebut, peneliti memilih jenis rancangan yang sesuai untuk itu, yakni rancangan studi multi kasus (Hall, Hord & Griffin, 1980; Yin, 1984;

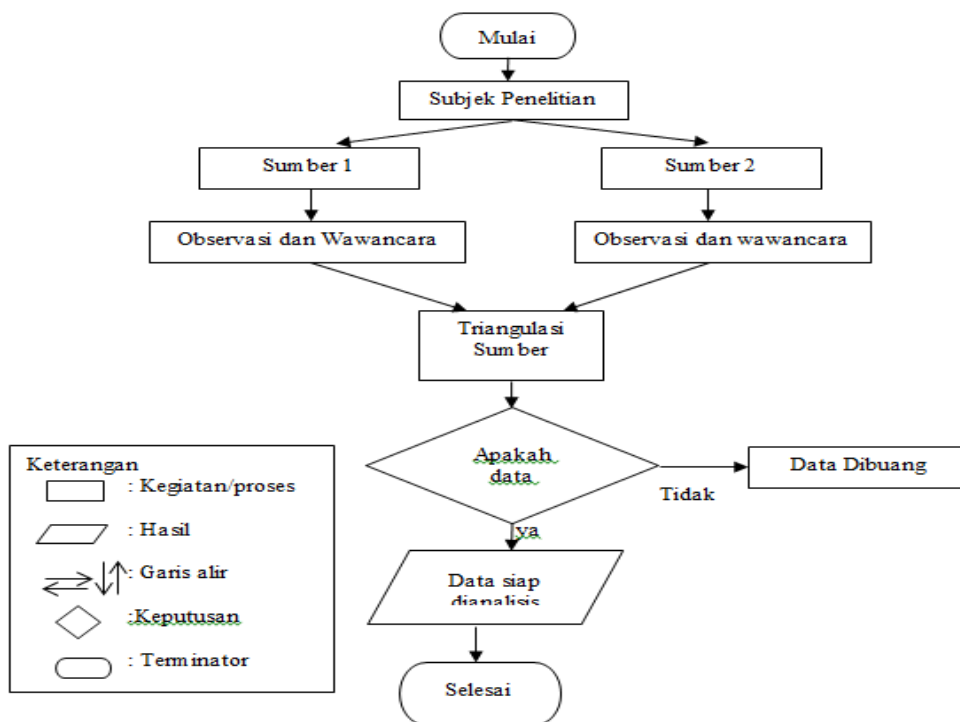
Bogdan & Biklen, 1998; Lengkong, 2004) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Objek dan Informan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMK Kimia Muda Madiun, SMK Mamba'ul Ulum Bondowoso, dan SMK Ihsaniat Ngoro, Jombang. Dipilihnya 3 SMK Mini tersebut sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa SMK Mini tersebut adalah yang menjadi juara Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan kriteria manajemen, kerja sama, keterkaitan dengan DUDI dan keterkaitan kompetensi dan pekerjaannya, dan hasil meliputi efektivitas kegiatan BKK, efektivitas pengembangan tenaga pelaksana, efektivitas penyerapan tenaga kerja. Pemilihan subjek ini didasarkan pada berita acara keputusan tim penilai tertanggal 24 Desember 2014 yang menyatakan bahwa juara I: SMK Kimia Muda Madiun, Juara II: SMK MamBa'ul Ulum Bondowoso, dan Juara III adalah SMK Ihsaniat Ngoro, Jombang.

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah ketua tim teknis dan anggota tim teknis SMK Muda Madiun, ketua tim teknis dan anggota tim teknis SMK Ihsaniat Jombang, ketua tim teknis dan anggota tim teknis SMK Mambaul Ulum Bondowoso sebagai *key informan*. Wawancara dilakukan pada bulan Pebruari sampai April 2015 di tempat objek penelitian masing-masing.

Gambar : Diagram Prosedur Pengumpulan Data



Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.

Hasil Penelitian

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor

Pemerintah Jawa Timur akan mendirikan sebanyak 80 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini di 80 pondok pesantren (ponpes) di sebagian wilayah Jawa Timur dan di mulai pada tahun ajaran 2014-2015. Masing-masing SMK Mini mendapat anggaran Rp 250 juta sebagai biaya operasional pendirian satu SMK Mini dan satu SMK Mini akan menampung 200 peserta didik dalam satu periode pengajaran.

SMK Mini sendiri didirikan sesuai dengan potensi daerah yang ada di wilayah pondok pesantren termasuk program studi (prodi) maupun materi yang akan diajarkan, disesuaikan dengan kebutuhan kerja di daerah sekitar. Kelulusan siswa SMK Mini akan mengantongi Sertifikat telah mendapat pelatihan di SMK Mini.

Peserta didik pada SMK Mini bisa diambil dari santri di ponpes tersebut maupun warga sekitar. Tidak ada syarat pendidikan khusus yang harus dimiliki calon peserta didik. Seleksi calon siswa SMK Mini diserahkan ke masing-masing ponpes. Belajar di SMK Mini mirip ikut pelatihan/kursus, dan waktu studinya sekitar enam bulan.

Selain bekerjasama dengan sejumlah politeknik yang ada di Jawa Timur seperti Politeknik Malang, Politeknik Jember, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan Akademi Perikanan dan Kelautan Sidoarjo, pihak pemerintah provinsi Jawa Timur pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga bekerjasama dengan pelaku dunia usaha dan industri yang ada di Jawa Timur untuk transformasi keahlian, pengetahuan serta peningkatan kompetensi. Untuk menunjang kualitas pembelajaran, guru pengajar SMK Mini akan dimagangkan di beberapa perusahaan sehingga apa yang diajarkan ke siswa SMK Mini merupakan pelajaran praktis yang bisa langsung diterapkan.

Berdasarkan data dokumentasi dan diskusi dengan teman sejawat menemukan bahwa dasar implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini dalam lingkungan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Timur adalah bentuk implementasi kebijakan hibah SMK Mini dalam pengembangan SMK di Pondok Pesantren Tahun 2014 yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2014 pasal 41 tentang balai latihan kerja atau SMK Mini di Pondok Pesantren dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 83 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014. Berdasarkan penetapan anggaran untuk penyelenggaraan SMK Mini di Pondok Pesantren tersebut, ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Strategis tahun 2010-2014 terutama pada point ke-3 yang berbunyi: “Kualitas dan relevansi layanan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri (*quality*)” (Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014).

Menurut Gubernur Jawa Timur, kebijakan SMK Mini dapat membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Jatim. Dengan dibangunnya SMK Mini para lulusan dari PP memiliki ketrampilan yang bisa bersaing dengan sekolah formal pada umumnya. Upaya-upaya tersebut tidak lepas dari kepedulian Pemprov Jatim dalam memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan di PP agar bisa diakui oleh dunia internasional.

Penjabaran tujuan kebijakan SMK Mini di atas, dijelaskan dalam pedoman teknis bantuan dalam pengembangan SMK di lingkungan Pondok Pesantren sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan kesempatan belajar SMK di Pondok Pesantren dan menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan perekonomian di lingkungan pondok pesantren.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran SMK di Pondok Pesantren.
- b. Meningkatkan skill para santri sehingga mampu membuka lapangan kerja di lingkungan pondok pesantren sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal (Pedoman Teknis Bantuan Dalam Pengembangan SMK di Pondok Pesantren, 2014: 2).

Sedangkan hasil yang diharapkan pada program bantuan hibah penyelenggaraan SMK Mini di lingkungan Pondok Pesantren adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya 80 SMK Mini di Pondok Pesantren yang berbasis kewirausahaan kompeten;
2. Terwujudnya 80 produk unggulan SMK Mini;
3. Terciptanya 80 sentra usaha berbasis pesantren (*Pesantren-preneurship*);
4. Mendorong terwujudnya Ekonomi kerakyatan di 80 SMK Mini (Pedoman Teknis Bantuan Dalam Pengembangan SMK di Pondok Pesantren, 2014:4).

Tujuan dan target yang diharapkan dari implementasi kebijakan SMK Mini sebagaimana uraian tersebut di atas lebih cenderung berorientasi pada upaya mewujudkan pelaku usaha yang tangguh, unggul dan kompeten di lingkungan Pondok Pesantren dalam rangka menyongsong MEA dan kompetisi dunia (pasar global).

Karakteristik Institusi dan Penguasa

Struktur birokrasi ini yaitu keseragaman bentuk dalam menghadapi masalah dan persebaran tanggung jawab kepada satuan organisasi yang terlibat. Dalam usaha melaksanakan kebijakan SMK Mini berusaha untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun pada kenyataannya masih perlu dilakukan penyempurnaan. Agar terdapat adanya keseragaman dalam menghadapi masalah dan persebaran tanggung jawab kepada satuan organisasi yang terlibat, maka diperlukan:

1. Pola hubungan dalam menjalankan wewenang

Substansi dari kebijakan SMK Mini ini lebih mengutamakan aspek pendidikan keahlian kewirausahaan. Peserta Didik yang dilayani tersebut terdiri dari masyarakat Pondok Pesantren yang meliputi Siswa SMK Reguler yang ada di Pondok Pesantren, para santri dan masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren yang membutuhkan pelayanan pendidikan ketrampilan kewirausahaan yang berbasis kompetensi, kendala dan aspek perbaikan program.

Pola hubungan yang digunakan dalam penyelenggaraan SMK Mini berdasarkan pernyataan dari Tim Teknis SMK Mini (antara SMK Mini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dengan *stakeholder*) adalah Hubungan yang dibangun sesuai kewenangan pada masing-masing instansi dan hubungan yang dibangun sesuai kewenangan pada masing-masing instansi dan hubungan yang saling berkesinambungan dalam setiap tingkatan dan komunikasi yang baik harus tetap selalu dijaga.

2. Mekanisme kerja dan koordinasi pelaksanaan kerja.

Mekanisme kerja dan koordinasi pelaksanaan kerja dalam penyelenggaraan SMK Mini sesuai dengan Sistem Prosedur (SOP) yang ada. Terkait dengan struktur birokrasi yang mencakup mekanisme kerja dan koordinasi penyelenggaraan kebijakan SMK Mini. Mekanisme kerja dan koordinasi pelaksanaan kerja dalam penyelenggaraan SMK Mini berdasarkan pernyataan dari Tim Teknis SMK Mini adalah Koordinasi dilakukan secara intensif oleh sekolah kepada pihak-pihak yang berkaitan (*Stakeholder*) baik perencanaan, pelaksanaan ataupun evaluasi.

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Sikap pelaksana disini berkaitan dengan apa yang harus dilaksanakan Tim Teknis SMK Mini berdasarkan kemampuan dan kewenangannya yang digunakan dalam penyelenggaraan SMK Mini berdasarkan pernyataan dari ibu Kustinah, S.Pd selaku Ketua Tim Teknis SMK Mini Ihsanniat Jombang sesuai hasil wawancara pada tanggal 25 Pebruari 2015, dan ibu Agustin Budi Arini, S.Pd selaku Ketua Tim Teknis SMK Mini Kima Mudda Madiun sesuai dengan hasil wawancara tanggal 23 Pebruari 2015, serta bapak Khairul Anam, S.Pdi selaku Ketua Tim Teknis dari SMK Mini Mambaul Ulum Bondowoso pada saat wawancara pada tanggal 27 Pebruari 2015 mengatakan sebagai berikut “Terbuka (dalam artian harus mampu menerima kritikan dan mencoba memahami masukan)”. Sikap pelaksana Tim Teknis SMK Mini berdasarkan kemampuan dan kewenangannya yang digunakan dalam penyelenggaraan SMK Mini bersifat Terbuka (dalam artian harus mampu menerima kritikan dan mencoba memahami masukan) yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan SMK Mini.

Komunikasi mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan SMK Mini. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi kebijakan SMK Mini sudah dilaksanakan dengan optimal. Karena dilaksanakan secara bersama-sama dengan Dinas/Badan/Bagian yang terkait dengan kebijakan SMK Mini. Disamping itu upaya yang digunakan untuk menampung aspirasi pelaksana penyelenggara SMK Mini dalam memberikan saran dan kritikan dilakukan secara terbuka yang bisa disampaikan dalam berbagai forum, seperti misalnya pada rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dengan memberikan saran atau kritik yang sifatnya membangun tentunya demi kebaikan dan upaya peningkatan kebijakan SMK Mini. osialisasi kebijakan SMK Mini sudah dilaksanakan dengan baik dan efisien karena dilaksanakan secara bersama-sama secara sinergi dengan dinas terkait dalam pengembangan kegiatan SMK Mini.

Melalui keterbukaan dalam menerima masukan yang berupa saran atau kritikan ini, pimpinan akan bisa mengevaluasi pola kerja organisasi yang telah dilakukan. Pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan kebijakan SMK Mini. Upaya yang digunakan untuk menampung aspirasi (saran dan kritikan) dari Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam penyelenggaraan SMK Mini sudah berjalan dengan baik yaitu melalui berkomunikasi langsung dengan DU/DI melalui rapat, *by phone* dan melalui email. Dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang terjadwal dan terkoordinasi dengan rutin, baik intern maupun dengan dinas / badan / bagian yang berwenang, diharapkan akan membawa perbaikan-perbaikan kualitas penyelenggaraan kebijakan SMK Mini di Jawa Timur.

Upaya yang digunakan untuk menampung aspirasi pelaksana penyelenggara SMK Mini dalam memberikan saran dan kritikan dilakukan secara terbuka yang bisa disampaikan dalam berbagai forum. Seperti rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dengan memberikan saran atau kritik yang sifatnya membangun demi peningkatan kebijakan SMK Mini yang lebih baik lagi. Hal ini juga untuk menghilangkan adanya budaya *feodalisme*, dimana bawahan tidak berani mengutarakan pendapatnya selain selalu menganggap benar pimpinan dalam setiap rapat yang dilaksanakan. Dengan keterbukaan dalam menerima masukan berupa saran atau kritikan ini, sebagai pimpinan akan mengevaluasi pola kerja organisasi yang telah dilakukan yang pada gilirannya akan mengarah pada peningkatan kebijakan SMK Mini yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pembinaan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada pelaksana kebijakan (penyelenggara SMK Mini) dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan cara mengundang langsung sekolah penerima

program dalam bentuk rapat- rapat, pelatihan, workshop, dan pembinaan lainnya. Berkaitan dengan indikator tersebut bahwa Komunikasi dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan SMK Mini di Jawa Timur sudah dilakukan dengan baik, dan sudah dilaksanakan dengan optimal.

Ketepatan Sasaran Program

Efektivitas atau Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan organisasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran program. Ketepatan sasaran program SMK Mini diharapkan dapat menunjang dalam menyelenggarakan kebijakan SMK Mini.

Efektivitas implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara *output* dengan Pedoman Teknis Bantuan SMK Mini Dalam Pengembangan SMK di Pondok Pesantren Tahun 2014 oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

SMK Mini mengembangkan skill *entrepreneurship* kepada peserta didik dengan menyesuaikan kompetensi keahlian di SMK Regular dan siap dikembangkan. Ketetapan sasaran program penyelenggaraan SMK Mini juga ditinjau dari aspek kesiapan siswa antara 100-200 siswa atau santri dalam mengikuti program SMK Mini. Dari beberapa temuan observasi di SMK Mini yang mendapatkan bantuan pengembangan SMK di Pondok Pesantren tahun 2014 menunjukkan minimal peserta program dalam penyelenggaraan SMK Mini adalah 100 peserta.

Dari ketetapan sasaran peserta program SMK Mini sudah tepat sasaran. Hal ini dikarenakan penyelenggara SMK Mini di Jawa Timur menampung siswa antara 100-200 siswa atau santri dalam mengikuti program SMK Mini. SMK Mini melakukan rekrutmen dengan cara sosialisasi ke siswa SMK, ke Santri Pondok yang umur 16 tahun ke atas yang tidak sekolah di SMK, ke Alumni Pondok pesantren yang sudah bermasyarakat dan ke Masyarakat sekitar pondok pesantren. Dalam hal ini rekrutmen untuk masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan perangkat desa setempat untuk menyeleksi peserta usia produktif yang mempunyai potensi dan minat. Sedangkan dalam melakukan identifikasi keunggulan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara SMK Mini melalui analisis kebutuhan dan kemampuan SMK Mini. Penyelenggara SMK Mini mengidentifikasi keunggulan daerah melalui identifikasi melalui analisis kebutuhan dan kemampuan yang mampu dikembangkan oleh SMK, walaupun belum semua bisa melakukannya. Efektivitas implementasi penyelenggaraan SMK Mini juga ditinjau dari pemanfaatan program bantuan program dan cara pemanfaatannya.

Sejauh ini bantuan sudah dimanfaatkan untuk perlengkapan usaha, pembukuan dan kebutuhan promosi. Serta ada sebagian dana yang diberikan kepada peserta yang dianggap lulus untuk bisa membuka atau megembangkan usaha yang sesuai dengan tujuan pelatihan. Pemanfaatan bantuan program untuk *benchmarking*/pengukuran dan pengembangan (Dalam atau Luar Negeri) sesuai pedoman teknis maksimal 10%, bahwa bantuan program sudah dimanfaatkan untuk *benchmarking*/pengukuran dan pengembangan pengukuran pengembangan dilakukan untuk melakukan kunjungan industri ke perguruan tinggi terdekat, dan ada yang belum memanfaatkan. Monitoring dan evaluasi dari dinas pendidikan provinsi, juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui program pelatihan ketrampilan, dan juga untuk untuk masyarakat, sebagai modal bagi masyarakat untuk mengembangkan atau membuka usaha sesuai tujuan pelatihan.

Dalam hal ini efektivitas implementasi kebijakan Penyelenggaraan SMK Mini di Jawa Timur ditinjau dari ketepatan sasaran program SMK Mini cukup menunjang dalam menyelenggarakan kebijakan SMK Mini, dan ditinjau dari tujuan program SMK Mini

dalam hal ini sudah meningkatkan skill para santri sehingga mampu membuka lapangan kerja di lingkungan pondok pesantren sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, serta ditinjau dari pemantauan program SMK Mini, maka efektivitas implementasi kebijakan Penyelenggaraan SMK Mini di Jawa Timur sudah benar-benar efektif.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa proses implementasi kebijakan Penyelenggaraan SMK Mini di Jawa Timur mengacu pada model implementasi menurut Grindle ditinjau dari isi kebijakan dan konteks kebijakan sudah dilakukan dengan baik, sudah dilaksanakan dengan optimal. Masyarakat dapat optimal menerima manfaat program, tumbuhnya peserta didik sebagai wirausaha, gubernur Jawa Timur secara serius dengan memberikan dukungan politi dalam bentuk perda dan dukungan anggaran, lembaga pelaksanaan dalam hal ini adalah diknas pemprov Jatim. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; dan kepatuhan dan daya tanggap semuanya berjalan dengan baik. Sikap pelaksana Tim Teknis SMK Mini berdasarkan kemampuan dan kewenangannya yang digunakan dalam penyelenggaraan SMK Mini bersifat Terbuka (dalam artian harus mampu menerima kritikan dan mencoba memahami masukan) yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan SMK Mini” serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan SMK Mini berusaha untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya walaupun pada kenyataannya masih perlu dilakukan penyempurnaan. Maka secara keseluruhan proses implementasi kebijakan Penyelenggaraan SMK Mini di Jawa Timur sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan proporsinya.

Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Program SMK Mini

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang program SMK Mini adalah teori yang dikemukakan oleh Grindle. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut Grindle (1980:9) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh Content of implementation dan Context of implementation. Content of implementation mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; jenis manfaat yang dihasilkan; derajat perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; siapa pelaksana program; dan sumber daya yang dikerahkan. Context of implementation mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; dan kepatuhan dan daya tanggap.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Kebijakan SMK Mini merupakan kebijakan atas inisiatif gubernur. Dengan kekuasaan dan kewenangan memiliki kekuatan untuk melakukan koordinasi dan meningkatkan kualitas komunikasi telah berjalan dengan baik. Dinas Pendidikan Jawa Timur telah memahami betul substansi kebijakan sesuai arahan dari gubernur. Pada tahap awal sosialisasi di internal diknas tentang substansi kebijakan dilakukan dengan melakukan koordinasi pelaksanaannya. Kemudian sosialisasi-komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan mengundang sebanyak 200 pondok pesantren di Jawa Timur yang mengelola SMK tentang kebijakan program SMK Mini mencakup isi program, maksud dan tujuan, model pelaksanaannya.

Pelaksanaan program kebijakan akan baik bila tercukupi sumberdayanya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan

dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Pelaksana program SMK Mini telah memahami dalam melaksanakan program ini. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan di lapangan bahwa pihak diknas kurang mengetahui kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan karena diknas memperoleh informasi hanya berdasarkan proposal yang masuk tanpa verifikasi lapangan.

Kekurangan informasi/penggetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

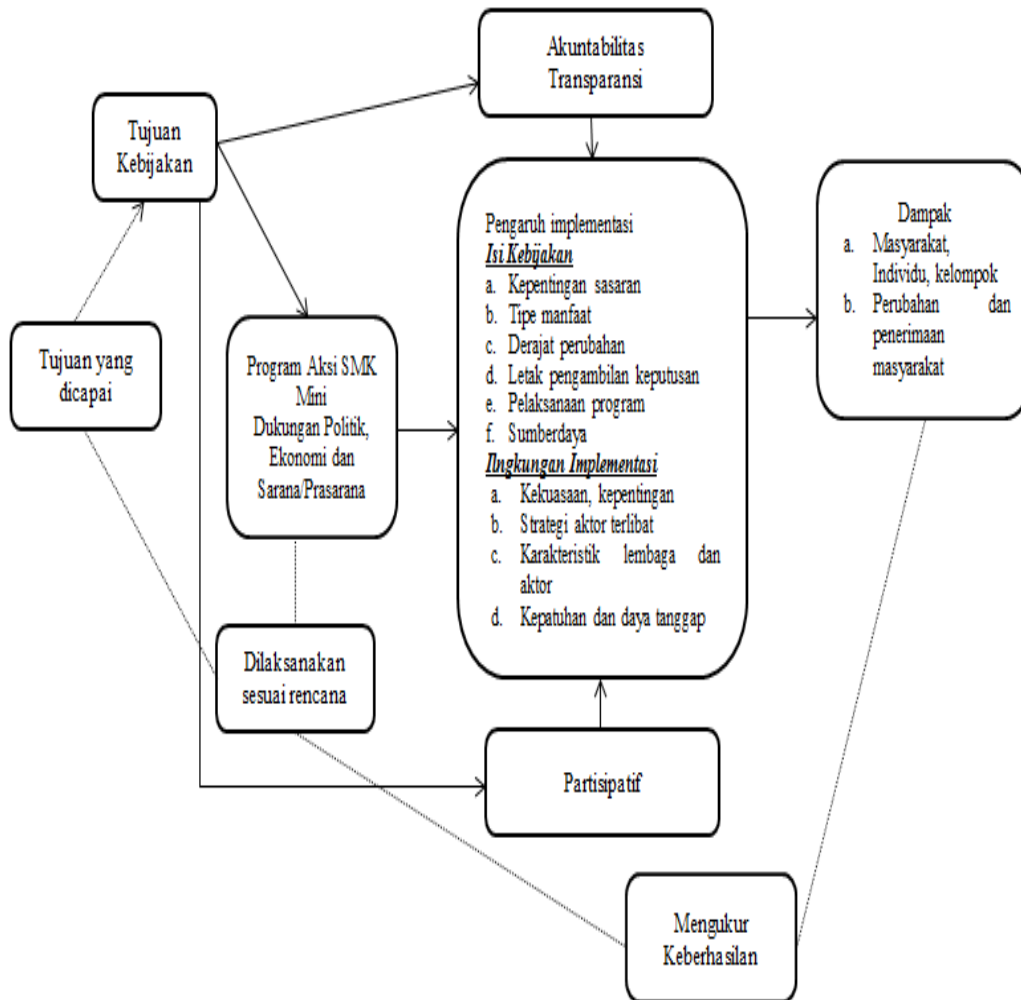
Berdasarkan pendapat Grindle, struktur birokrasi dalam pelaksanaan program SMK Mini sangat baik ditandai dengan kompetensi pelaksana, adanya pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam penggunaan anggaran, dilakukannya monitoring oleh pihak independen atas kesesuaian rencana program dengan pelaksanaan, adanya dukungan politik dari legislatif, ormas dan LSM serta terjalinnya komunikasi yang efektif dan efisien dengan menggunakan IT (medsos). Dengan demikian aspek struktur birokrasi sangat memadai untuk terwujudnya implementasi kebijakan SMK Mini secara efektif dan efisien.

Paparan di atas menjelaskan bahwa implementasi SMK Mini di Provinsi Jawa Timur diawali dengan adanya *political will* pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat khususnya di lingkungan pondok pesantren agar memiliki jiwa kewirausahaan dan menguasai jenis keahlian dalam menghadapi perkembangan jaman. Pelaksanaan kebijakan SMK Mini dengan cara memasukkan isu pengembangan SDM pondok pesantren melalui SMK Mini sebagai salah satu isu strategis pada dokumen perencanaan daerah (yang kemudian ditetapkan menjadi RPJMD berdasarkan Perda). Lebih dari ini kebijakan ini memberikan ruang bagi SMK untuk merencanakan jenis program sesuai potensi lokal, melaksanakan sendiri programnya, artinya kebijakan program SMK Mini dilaksanakan secara partisipatoris atau *bottom-up*. Dengan demikian model pelaksanaan program SMK Mini merupakan penggabungan antara *Top Down* dengan *Bottom-Up*.

Model Grindle dilapangan ternyata kurang memadai untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan program SMK Mini terutama variabel politik-sosial-budaya karena pelaksanaan SMK Mini memang sangat mempertimbangkan memperhatikan variabel itu. Bahkan pelaksanaan kebijakan SMK Mini dilaksanakan secara partisipatif, dalam arti SMK Mini diberikan keleluasaan merencanakan program sesuai potensi lokalnya, dan juga dalam

melaksanakan program. Dengan demikian implementasi program SMK Mini merupakan gabungan antara *top-down* dan *bottom-up*. Oleh karena itu penyusunan model implementasi pelaksanaan SMK Mini rekonstruksi dari model Grindle terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar : Rekonstruksi Model Marilee S Grindle oleh Hudiono



Sumber : Olah Data Lapangan

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penyajian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari Isi Kebijakan, yaitu Kepentingan sasaran, Tipe manfaat, Derajat perubahan, Letak pengambilan keputusan, Pelaksanaan program, Sumberdaya pelaksanaan program SMK Mini memberi dampak positif bagi penerima program dan apa yang menjadi tujuan menumbuhkan kewirausahaan dapat tercapai serta masyarakat penerima dapat menerima program secara senang dan terbuka. Kemauan pemerintah dalam hal ini gubernur untuk merealisasikan ditunjukkan dengan dikeluarkannya perda tentang SMK Mini, dibentuknya lembaga khusus untuk pelaksanaan program. Konsistensi Perintah pelaksanaan telah ditetapkan secara konsisten. Sumberdaya, Staf : Diknas telah memiliki staf yang kompeten, Jumlah

personil kurang memadai untuk cakupan wilayah Jawa Timur sejumlah 200 SMK Mini untuk melakukan verifikasi proposal dengan kondisi emik SMK dan dalam proses money. Skill pada umumnya sudah memadai, Pembiayaan : Teralokasikan dari APBD dengan sangat mencukupi, Informasi : disamping koordinasi secara formal juga menggunakan IT khususnya medsos, Wewenang : Adanya SK dan naskah kerjasama antara diknas dengan SMK, Fasilitas: sangat memadai. Disposisi, Dukungan Pelaksana : Legislatif, Ormas, LSM dan SMK sangat antusias mendukung dan sangat koordinatif. Struktur Birokrasi, Kelembagaan struktur dan fungsional : Telah terbentuk bidang yang menangani program SMK Mini dan Bidang pengelola program telah berkoordinasi dan berkomunikasi efektif dengan SMK di Pondok pesantren.

2. Model Penyelenggaraan SMK Mini, Model Marilee S Grindle dilapangan ternyata kurang memadai untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan program SMK Mini karena program SMK Mini didesain dan dilaksanakan secara partisipatif dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian model pelaksanaan program SMK Mini merupakan penggabungan antara *Top Down* dengan *Bottom-Up*, yaitu adanya penambahan variabel manajemen transparan-akuntabel dan partisipatif.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan untuk meningkatkan implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini di Jawa Timur dinyatakan sebagai berikut:

1. Proses komunikasi implementasi kebijakan SMK Mini sudah sesuai dengan prosedur, namun dalam pelaksanaannya perlu dikembangkan komunikasi yang menyeluruh terutama pada saat penyusunan rencana kegiatan dari SMK Mini yang bersangkutan, sehingga kualitas rencana kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak.
2. Sumber daya manusia dalam mendukung implementasi kebijakan SMK Mini sudah melibatkan berbagai pihak, namun karena berdasarkan pengalaman yang masih baru bagi SDM SMK Mini masih diperlukan peningkatan kemampuan kompetensi kewirausahaan bagi para tutor dan mentor di SMK Mini.
3. Disposisi sebgaiian besar implementasi kebijakan SMK Mini sesuai dengan petunjuk teknis, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi salah persepsi terhadap hal-hal yang bersifat teknis. Misalnya sudah melaksanakan kemitraan dengan perguruan tinggi, namun tidak ada relevansinya.
4. Struktur organisasi yang dimiliki SMK Mini perlu dikembangkan, terutama berhubungan dengan tokoh masyarakat, UMKM, IMKM di daerah wilayah SMK Mini. Dalam rangka, mengembangkan dan mengoptimalkan produk-produk SMK Mini untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di sekitar Pondok Pesantren.
5. Untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi diperlukan komitmen kerjasama kelembagaan dalam hal pelatihan dan tindak lanjut pengembangan kewirausahaan di SMK Mini.
6. Keterampilan kewirausahaan diusahakan linier dengan paket kompetensi keahlian di SMK Mini dan keunggulan potensi lokal.
7. Perlu disiapkan sejak awal SOP dan rancangan kegiatan pembelajaran dalam bentuk modul pelatihan tenaga kerja terampil sesuai paket kompetensi keahlian di SMK Mini dan keunggulan potensi lokal.

Dartar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aldrich, H., dan Zimmer, C. 1986. Entrepreneurship through social network. In D. L. Sexton & R. W. Smilor (Eds.). *The Art and Science of Entrepreneurship*
- Alma, Buchari. 2010. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making. Second Edition*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Anita Volintia Dewi, Endang Mulyatiningsih. 2013. *Pengaruh Pengalaman Pendidikan Kewirausahaan Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat Serta Keterampilan Kejuruan Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa*. Jurnal Pendidikan Vokasi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ananta, Aris. 1990. "Modal Manusia dalam Pembangunan Ekonomi." Dalam Ekonomi Sumber Daya Manusia. A. Ananda (ed.). Jakarta: Lembaga Demografi FEUI.
- Arfida. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Aswandi. 2001. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Renika Cipta.
- Atmodiwirio. 2002. *Manajemen Pelatihan*. Jakarta: PT Pustaka.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. No. 38/05/Th. XVII, 5 Mei 2014
- Baedhowi (2009). *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi*. Semarang: Pelita Insani.
- Bambang Rudito, dkk. 2003. *Akses Peran serta Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang. Depdiknas. 2009. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Buchari, A. 2009. *Kewirausahaan*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. Volume 2 No. 1.
- _____. 2005. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Budiyono, Aris. 2009. *Pengembangan Model Kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri dalam Pembelajaran Program Produktif untuk Mengembangkan Kewirausahaan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Bygrave, William D. 1996. *The Portable MBA: Entrepreneurship*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Djarmiko, M. Budi. 2011. *Business with Creative Learning*. Bandung: Thabi' Press.
- Djudju Sudjana. 1993. *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif Dalam Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Nusantara Press.
- Drucker, P.F. 1994. *Innovation and Entrepreneurship, Practices and Principle*. Terj. Rusdi Naib. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Dunn, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Faizah. 2012. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan Program Keahlian Jasa Boga di SMK Negeri 3 Malang*. Tesis Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Frinces, Z., Heflin. 2011. *Be An Entrepreneur*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Grindle, Merilee S. (Ed.). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeton University Press.

- Hakim, Abdul. 2010. *Model Pengembangan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Menciptakan Kemandirian Sekolah*. Jurnal Riptek. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Halim, A. 2005. Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren, dalam A. Halim, et. al. (ed), *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Hanrahmawan, Fitroh. 2010. *Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja*. Jurnal Administrasi Publik. Makasar: Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Makassar.
- Hill, Michael and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*, Sage Publications.
- Hisrich, R.D., Peters, M.P. dan Shepherd D.A. 2008. *Kewirausahaan Edisi 7*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Howlett, Michael, Ramesh, M. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Canada: Oxford University Press.
- Indra, Hasbi. 2003. *Pesantren dan Transformasi Sosial: Studi Atas Pemikiran K.H. Abdullah Syafi'ie dalam Bidang Pendidikan Islam*. Jakarta: Penamadani.
- Jalal, F., & Supriadi D., (Ed.). 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kafrawi. 1983. *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Rajawali.
- Kasmir. 2007. *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Katz, J.A. dan Green, R.P. 2009. *Entrepreneurial Small Business*. Boston: Mc-Graw Hill International Edition.
- Keputusan Gubernur Nomor 914/54/213.2/2014 tanggal 16 Desember 2013 tentang *Pengesahan Dokumen pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014*.
- Komaruddin. 2006. *Pengembangan dan Pelatihan*. Bandung: Kappa-Sigma.
- Krueger, N. F. Carsrud, A. L. 1993. Entrepreneurial intentions: Applying the theory of planned behavior. *Entrepreneurship & Regional Development*, 5:315-330.
- Lambing, Peggy dan Charles L. Kuehl. 2000. *Enterpreneurship*. New Jersey : Prentice Hall International Inc.
- Linton, R.P dan Pareek, U. 1992. *Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pessindo.
- Longenecker, Justin G., dkk. 2001. *Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil*. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Maemunah, Yanti. 2004. *Pengaruh Perilaku Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha*, Skripsi. Bandung: UPI.
- Mantja, Willem. 2003. *Etnografi Desain Penelitian dan Manajemen Pendidikan*. Malang: Wineka Media.
- _____. 2005. *Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pendidikan*. Kumpulan Karya Tulis Terpublikasi. Malang: Wineka Media.
- Mastuhu. 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- _____. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Meredith, G.G. et. al., 1996. *Kewirausahaan Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Binnaman Presindo.
- Munawir, Yusuf. 1997. *Standarisasi Tes Kewirausahaan Versi Indonesia*. Solo: Laporan Pelaksanaan Penelitian UNS.

- Mustadi, 2013. *Pengembangan Internalisasi Nilai-nilai Entrepreneurship Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan*. Disertasi Program Studi Keislaman. Surabaya: UIN.
- Modul Kewirausahaan Berbasis Kompetensi, LSP Manajemen Wirausaha dan Produktivitas “Merdeka”.
- Aishah Buang dan Isteti Murni. 2006. *Prinsip-Prinsip Kewirausahaan Konsep, Teori, Model Pembentukan Wirausaha*. Bangi: Fakultas Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nugroho, Riant dan H.A.R Tilaar. 2008. *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Osborne, D. dan Gaebler, T.1995. *Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government, How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector)*. Jakarta: PPM Dan PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Pardjono.2011. *Makalah. Peran Industry dalam pengembangan SMK. Pedoman Teknis Bantuan SMK Mini Dalam Pengembangan SMK di Pondok Pesantren Tahun 2014*. 2014. Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Bidang Dikmenjur dan Perti.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 7 Tahun 2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Perubahan Pergub No. 83 Tahun 2013 tentang *Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014*.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 83 Tahun 2013 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014*.
- Petunjuk Teknis 2014 Bantuan Pembelajaran Kewirausahaan SMK* . Jakarta: Direktorat Jeneral Pendidikan Menengah Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2014.
- Petunjuk Teknis 2014 Pemantauan dan Evaluasi Program SMK*. Jakarta: Direktorat Jeneral Pendidikan Menengah Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2014.
- Prasetyo, Bambang dan Lina M.Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Prawirokusumo, Soeharto. 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Yogyakarta: BPFE.
- Putra, S. 1998. *Membina Sikap Mental Wirausaha*. Jakarta: Gunung Jati.
- Rahardjo, M. Dawam. 2003. *Pergulatan Dunia Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Ratuman, T. G. dan Laurens, T. (2003). *Evaluasi Hasil Belajar Yang Relevan Dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Surabaya. Unesa University Press.
- Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.
- Rizzo, M. & Eslinger, Paul J. (2004). “*Principles and Practice of Behavioral Neurologi and Neuropsychology*”. Pp 615-634, Philadelphia PA: WB Saunders Company.
- Sabatier, Paul A dan Mazmanian, Daniel A. 1983. *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company. Amerika
- Sanusi, Uci. 2012. *Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren: Studi Mengenai Realitas Kemandirian Santri di Pondok Pesantren al-Istiqlal Cianjur dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tasikmalaya*. Jurnal Jurnal Pendidikan Agama Islam. Jakarta: LPM Universitas Islam Jakarta.
- Steenbrink, Karel A. 1989. *Pesantren Madrasah Sekolah*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono A.G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

- Suhartini. 2005. Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren, dalam A. Halim et. al. (eds). *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- _____.2005. *Analisi Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukmana. 2010. *Peran Pendidikan Kewirausahaan Dalam Menumbuhkan Motivasi Wirausaha*. Jurnal Administrasi Publik. Makasar: Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Makassar.
- Sulton. 2003. Manajemen Kewirausahaan Pendidikan, dalam Ali Imron, et. al (ed), *Manajemen Pendidikan Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sumardiningih, S. 2010. *Pengembangan Model Pengintegrasian Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewirausahaan Dalam Pembelajaran di SMK Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis Pendidikan Ekonomi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Sunarto, Moerdiyanto. 2009. *Pengembangan Model Pendidikan Kewirausahaan Bagi Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bantul*. Disertasi Pendidikan Sosial dan ekonomi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suryana. 2014. *Kewirausahaan; Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Sukowati, Praptining, 2010, *Transformasi Model New Governance dalam Penyelenggaraan Good Governance*
- , 2011 *Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, Program Pascasarjana Univ Brawijaya Malang Press.
- , 2012, *Model New Governance dalam Good Governance*, Program Pascasarjana Univ Brawijaya Malang Press.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Yogyakarta: Cemerlang Publisher.
- Usmara, A. (Ed.). 2003. *Implementasi Manajemen Strategik, Kebijakan Dan Proses*. Jokjakarta: Amara Books.
- Van Meter & Van Horn, February 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society*, Vol. 6, No. 4, 445-487.
- Wahab, Abdul Solichin. 2009. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Menggerakkan Tradisi Esai-esai Pesantren*. Yogyakarta: LKIS.
- Winardi, J. 2008. *Entrepreneur & Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2004. *Entrepreneur*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, B. 2001. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, Agung. 2009. *Pengembangan Model Pembelajaran Internalisasi Nilai-Nilai Kewirausahaan pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Malang*. Jurnal Ekonomi. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Winarto, Paulus. 2004. *First Step to be An Entrepreneur*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Yuyus, Suryana dan Bayu Kartib. 2010. *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses. (edisi pertama)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Z. Heflin Frinces. 2004. *Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis*. Yogyakarta: Darussalam.
- Zakarsyi, Amal Fathullah. 1998. *Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zamroni., 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Zein, Mahmud Ali. 2005. "Model-Model Perkembangan Ekonomi Pondok Pesantren: Pengalaman Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan", dalam A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Zhilkia, Y. 2003. *Gender Differences in Mathematics Learning*. School Science in Mathematics.110 (3): 115-117.
- Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Zimmerer, Thomas W. Et al. 1996. *Entrepreneurship and The New Venture Formation*. New Jersey: Prentice Hall.
- Zimmerer, Thomas W dan Norman M. Scarborough. 2004. *Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil. Edisi-2*. Jakarta: PT. Indeks.